

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

Oleh :

NAJWA DEISYA MAYLA

Peredaran mata uang palsu di Indonesia tergolong *extraordinary crime* karena merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, pelaku adalah seorang anak sehingga tunduk pada UU SPPA. Isu hukum yang muncul ialah apakah tepat hakim menjatuhkan pidana bersyarat meskipun jaksa menuntut penjara, mengingat adanya pertentangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak anak. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak dan Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pola metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu tidak hanya berpijak pada aspek yuridis melalui penerapan KUHAP, UU Mata Uang, dan UU SPPA, tetapi juga mencakup aspek

Najwa Deisya Mayla

filosofis yang menekankan pendidikan, pembinaan, dan keadilan restoratif, serta aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi sosial anak, hasil penelitian BAPAS, dan dukungan keluarga agar anak dapat kembali diterima di masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak melalui pidana bersyarat dan pelayanan masyarakat yang bersifat humanis, restoratif, dan mendidik.

Saran dalam penelitian ini yaitu agar Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap konsisten menerapkan aspek yuridis melalui keadilan restoratif, mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat nilai, norma, serta kondisi sosial agar anak dapat diterima kembali di masyarakat, serta memperhatikan aspek filosofis yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap melindungi hak anak. Hakim juga perlu konsisten menerapkan tujuan pemidanaan anak sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sementara pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan memperluas program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial, serta dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan agar anak dapat dibina secara optimal, terhindar dari pengulangan tindak pidana, dan mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Mata Uang Palsu, Anak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDICIAL CONSIDERATIONS REGARDING OFFENDERS OF COUNTERFEIT CURRENCY CRIMES COMMITTED BY CHILDREN

(Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

By:

NAJWA DEISYA MAYLA

The circulation of counterfeit currency in Indonesia is classified as an extraordinary crime as it undermines economic stability and public trust. This crime is regulated under Law No. 7 of 2011, carrying a maximum penalty of 15 years' imprisonment and a fine of up to IDR 10 billion. In case No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, the perpetrator is a minor, thus subject to the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012). The legal issue arising is whether it is appropriate for the judge to impose a conditional sentence despite the prosecutor demanding imprisonment, considering the conflict between state interests and the protection of children's rights. This study discusses the judicial considerations regarding offenders of counterfeit currency crimes committed by children. The research problems in this study are: What are the judicial considerations for offenders of counterfeit currency crimes committed by children And, are the judges' decisions in cases of counterfeit currency crimes committed by children in accordance with the objectives of sentencing under the Child Criminal Justice System Law

The research method used in this study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data used consist of primary and secondary data. The informants in this study are judges at the District Court of Kota Agung and lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data will be processed through stages of data selection, classification, and systematization. The processed data will be presented descriptively and analyzed qualitatively.

Based on the research results and discussion, the judicial considerations in decision number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot regarding a child as an offender of counterfeit

Najwa Deisy Mayla

currency crimes are not only based on juridical aspects through the application of the Criminal Procedure Code, the Currency Law, and the Child Criminal Justice System Law (SPPA), but also include philosophical aspects emphasizing education, guidance, and restorative justice, as well as sociological aspects that consider the child's social conditions, recommendations from the Correctional Institution (BAPAS), and family support to enable the child to be reintegrated into society. The sentencing of children who commit counterfeit currency crimes has been in accordance with the objectives of sentencing under Law Number 11 of 2012 on SPPA, which prioritizes protection, guidance, and the best interests of the child through conditional sentences and community service that are humane, restorative, and educational.

The suggestion in this research is for the Judge to, when issuing decisions, should consistently apply juridical aspects through restorative justice, consider sociological aspects by taking into account social values, norms, and conditions so that the child can be reintegrated into society, and pay attention to philosophical aspects oriented toward justice, usefulness, and legal certainty while still protecting the child's rights. Judges also need to consistently apply the objectives of child sentencing in accordance with the principles in Law Number 11 of 2012, prioritizing the protection and best interests of the child. Meanwhile, the government and related institutions are expected to expand programs for guidance, skills training, and social activities, while family and community support is crucial to ensure that children are properly guided, prevented from repeating offenses, and able to reintegrate into social life.

Keywords: Judicial Considerations, Crime, Counterfeit Currency, Children.